

BAB III

REFLEKSI KEHIDUPAN SOSIAL ETNIS TIONGHOA DALAM BERMASYARAKAT DI INDONESIA

Kehidupan sosial masyarakat Tionghoa yang terdapat di dalam teks CBK HSD merupakan penggambaran adanya proses akulturasi budaya. Akulturasi budaya tersebut melibatkan dua kutub kebudayaan, yaitu kebudayaan Tionghoa sebagai budaya imigran (pendatang) dengan kebudayaan lokal yang terpusat di Jakarta. Pada masa kolonialisme Belanda, Jakarta lebih dikenal dengan Batavia dan menjadi ibu kota Hindia Belanda. Proses akulturasi budaya tersebut telah berjalan selama ratusan tahun tanpa menghilangkan karakteristik budaya Tionghoa sebagai pendatang. Beberapa hal yang menjadi fokus analisis berkaitan dengan akulturasi menyangkut kehidupan masyarakat peranakan Tionghoa di dalam teks CBK HSD, diantaranya;

3.1 Refleksi Kehidupan Sosial dan Budaya Etnis Tionghoa Berdasarkan Keturunan

Akulturasi antara budaya Tionghoa dengan budaya lokal tidak dapat dilepaskan dari sisi historis pembentukan kota Batavia. Batavia pada waktu itu telah menjadi semacam daya tarik tersendiri bagi masyarakat Tionghoa. Keberadaan masyarakat Tionghoa di Batavia sudah memberikan corak kehidupan yang khas dan menjadi salah satu ciri keramaian bagi perkembangan Batavia (CBK HSD: 36). Benny G Setiono melaporkan bahwa peranan Gubernur Jenderal

Jan P Coen sangat besar dalam membangun kota Batavia sejak tahun 1916. Pembangunan kota Batavia pada waktu itu telah menjadi semacam 'magnet' bagi kedatangan etnis Tionghoa dari berbagai suku. Coen melihat bahwa potensi kerja keras dan keuletan etnis Tionghoa dapat dijadikan semacam *partner* untuk membangun kota Batavia (Benny, 2004). Kedatangan etnis Tionghoa di Batavia merupakan awal pertemuan dengan kutub kebudayaan lokal yang menyebabkan terjadinya akulturasi budaya.

Data yang disampaikan oleh Benny memperlihatkan bahwa sejak dulu etnis Tionghoa sangat dikenal dengan etos kerjanya yang keras. Etos kerja etnis Tionghoa tersebut memberi keuntungan bagi mereka dalam megembangkan usahanya selama di Hindia Belanda. Mereka pada akhirnya diberi hak-hak istimewa oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memanfaatkan lahan perekonomian, salah satunya adalah jalur perdagangan.

Pada perkembangan lebih lanjut kehadiran masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda mengenal adanya sistem stratifikasi (tingkatan) sosial di dalamnya. Stratifikasi sosial di dalam masyarakat Tionghoa merupakan dampak langsung dari proses akulturasi yang sedang berjalan. Etnis Tionghoa mulai terbagi dalam dua kelompok yang didasarkan pada percampuran darah atau keturunan. Kelompok pertama terdiri dari orang-orang Tionghoa asli atau disebut Tionghoa *totok* karena mereka tetap memegang teguh garis keturunan dari tanah leluhurnya Tiongkok (China). Kelompok kedua merupakan hasil dari proses akulturasi budaya yang melahirkan kelompok masyarakat peranakan Tionghoa. Masyarakat

peranakan Tionghoa muncul karena adanya perkawinan individu Tionghoa dengan individu pribumi sebagai salah satu proses berakulturasi.

Terbaginya etnis Tionghoa menjadi dua kelompok masyarakat menyebabkan adanya konflik horisontal. Konflik horisontal tersebut lebih disebabkan kelompok Tionghoa *totok* merasa dirinya paling tinggi derajatnya daripada kelompok peranakan Tionghoa. Kelompok Tionghoa *totok* merasa keaslian identitas budaya leluhurnya masih terjaga dibanding peranakan Tionghoa yang sudah bercampur darah dengan masyarakat pribumi.

Di dalam teks CBK HSD digambarkan konflik etnis Tionghoa *totok* yang diwakili oleh tokoh Oey Eng Goan terdiri dari orang-orang *hoa-kiau* yang merasa masih murni dan menganggap keberadaannya di Hindia Belanda hanya sementara untuk sekadar mencari kekayaan. Sedangkan kelompok peranakan Tionghoa yang diwakili oleh Tan Peng Liang (Semarang) disebut *kiau-seng* yang dianggap kurang beradab dan tidak menguasai bahasa resmi *Kuo-Yu* kecuali bahasa lokal. Orang-orang *hoa-kiau* dipercaya oleh pemerintah Belanda duduk dalam majelis *Kong Koan* atau *Raad van chinezen*, suatu majelis yang mengurus masalah etnis Tionghoa di Hindia Belanda (CBK HSD: 38-40).

Pembentukan majelis perwakilan Tionghoa di Hindia Belanda pertama kali terjadi semenjak pemerintahan Gubernur Jan P Coen. Sebagai balas jasa atas peranan Souw Beng Kong dalam menggerakkan masyarakat Tionghoa dari Banten untuk membangun Batavia, dia diberi pangkat Kapitan Tionghoa (Kapitein der Chinezen) yang pertama di Hindia Belanda. Inilah untuk pertama kali seorang tokoh etnis Tionghoa berhasil dirayu Belanda untuk bekerja sama

dengan mereka. Dengan pangkat *tituler* tersebut Souw Beng Kong ditugaskan untuk mengatur dan mengendalikan komunitas Tionghoa di Batavia agar patuh kepada setiap peraturan yang dibuat VOC. Coen segera memerintahkan agar Souw Beng Kong membangun kota dan memajukan perdagangan Batavia (Benny, 2004).

Permasalahan dikotomi etnis Tionghoa *totok* dengan peranakan Tionghoa dimulai sejak puncak imigrasi orang-orang Tionghoa ke Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sampai menjelang Perang Dunia ke II. Pada masa itu, setelah merasa mapan di tempat yang baru, mereka mendatangkan istri atau perempuan-perempuan Tionghoa dari kampung halamannya masing-masing untuk diajak hidup bersama dan membangun keluarga di tempat baru tersebut. Karena selama hampir dua ratus tahun terpisah dengan tanah leluhurnya, kelompok peranakan Tionghoa di Hindia Belanda boleh dikatakan telah membaaur dengan masyarakat setempat, walaupun masih memegang teguh adat istiadat dan tradisi yang di bawa dari daratan Tiongkok. Namun pada umumnya mereka tidak dapat lagi bercakap-cakap dalam bahasa Tionghoa/Fujian (Benny, 2004).

Leo Suryadinata melalui tulisannya melihat adanya dikotomi kelompok etnis Tionghoa berkaitan dengan orientasi kebangsaan sejak 1917. Pertama, merupakan kelompok yang berorientasi pada nasionalisme Tiongkok yang dikenal dengan grup *Sin Po* yang diketuai oleh Kwee Kek Beng. Kedua, merupakan kelompok yang berorientasi pada nasionalisme Hindia Belanda (Indonesia) yang terdiri dari para lulusan perguruan tinggi negeri Belanda yang datang ke Pulau

Jawa. Kelompok kedua ini mempunyai tujuan membela kepentingan peranakan Tionghoa di Hindia Belanda (Leo Suryadinata dalam Prisma, 1984: 84-85).

Kelompok Tionghoa *totok* yang merasa dirinya lebih tinggi dengan kemurnian identitas budaya yang masih melekat secara tidak langsung 'menyinggung' harga diri kelompok peranakan Tionghoa. Sikap-sikap arogansi dan besar kepala selalu ditunjukkan oleh anggota kelompok Tionghoa *totok* dalam memandang keberadaan peranakan Tionghoa. Dipercayanya anggota kelompok Tionghoa *totok* duduk dalam sebuah majelis perwakilan Tionghoa semakin 'menganaktirikan' kelompok peranakan Tionghoa. Keberadaan kelompok peranakan Tionghoa berada ditengah-tengah antara kelompok Tionghoa *totok* dan keberadaan kelompok pribumi. Peranakan Tionghoa pada akhirnya menemui semacam 'keterbelahan' identitas menyangkut masalah kewarganegaraan.

Kelompok Tionghoa *totok* bersikeras memegang kewarganegaraan Tiongkok dan berpendapat bahwa orang yang berdarah Tionghoa, di mana pun mereka berada, dengan sendirinya berwarganegara Tiongkok (CBK HSD: 40). Masalah kewarganegaraan yang dianut oleh kelompok Tionghoa *totok* lebih melihat pada aspek keturunan orang Tionghoa. Mereka beranggapan bahwa semua orang yang dilahirkan dan mempunyai pertalian darah dengan tanah Tiongkok merupakan warga negara yang berkebangsaan Tiongkok. Hal tersebut juga didukung oleh kebijaksanaan luar negeri Tiongkok.

Pemerintah Kerajaan Tiongkok pada tahun 1909 mengeluarkan undang-undang Kebangsaan yang menyatakan bahwa seluruh orang keturunan Tionghoa atau setiap anak yang sah maupun tidak sah dengan seorang ayah Tionghoa (atau

seorang ibu Tionghoa apabila ayahnya tidak diketahui) adalah berkebangsaan Tiongkok (asas jus sanguinus). pada tanggal 10 Februari 1910, pemerintah Kerajaan Belanda mengumumkan berlakunya “Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap” (WNO) atau undang-undang tentang Kawula Belanda (Ned.Stbl. No.55). WNO menyatakan bahwa seluruh orang Tionghoa yang telah menjadi keturunan kedua yang lahir di Hindia Belanda adalah kawula Belanda (asas jus soli). Masalah dwi-kewarganegaraan ini terus berlanjut sampai ditandatanganinya Perjanjian Dwi-kewarganegaraan antara Pemerintah Republik Indonesia Orde Lama dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1955 (Benny, 2004).

Dua kebijaksanaan pemerintahan tersebut jelas meletakkan kelompok peranakan Tionghoa pada posisi yang ambigu (kemenduaan). Di satu sisi mereka adalah warga negara Tiongkok yang menganut asas *ius sanguinis* berdasarkan garis keturunan sedangkan di sisi lain mereka adalah warga Hindia Belanda karena pemerintahan Kolonial Belanda menerapkan asas *ius soli* yang berpedoman pada tempat kelahiran.

Tercerabutnya kehidupan sosial etnis Tionghoa dari kehidupan masyarakat pribumi tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah kolonial Belanda. Belanda melihat potensi besar dari etos kerja etnis Tionghoa berusaha menciptakan jarak dengan masyarakat pribumi. Dengan hak-hak istimewa yang diberikan pada warga Tionghoa, Belanda seakan-akan menciptakan kecemburuan sosial dalam diri masyarakat pribumi.

Keadaan demikian membuat kehidupan masyarakat peranakan Tionghoa sangat tidak diuntungkan atau dapat juga dikatakan terjepit diantara dua kutub yang berlawanan berdasarkan kepentingan. Pertama masyarakat peranakan Tionghoa dihadapkan pada kelompok Tionghoa *tolok* yang notabene sangat diistimewakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kedua mereka dihadapkan pada masyarakat pribumi sebagai mayoritas yang *mengusung* kepentingan kebangsaan (nasionalis) dan terlanjur memberikan penilaian negatif (pengkhianat) terhadap semua yang 'berbau' atribut kolonialisme Belanda.

Keadaan tersebut memaksa masyarakat peranakan Tionghoa di Indonesia tidak hanya membentuk kantong kultural, melainkan juga kantong sosial yang tersendiri. Kecenderungan serupa itu terutama juga tercipta secara struktural di dalam masyarakat Tionghoa itu sendiri setelah masuknya penjajah Belanda ke Indonesia, penjajah membentuk suatu masyarakat kolonial di Indonesia dengan menjadikan diskriminasi rasial sebagai dasarnya. Belanda dengan sengaja menciptakan perpecahan etnis yang telah ratusan tahun hidup secara damai dalam lingkaran akulturasi.

Suryadinata berpendapat bahwa pemisahan sosial yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu menyebabkan orang-orang peranakan Tionghoa muncul sebagai suatu kelompok sosial tersendiri. Pada gilirannya, pemisahan itu memberikan suatu lahan yang subur bagi terjadinya suatu pemisahan orientasi politik antar ras yang bersangkutan. Hal tersebut diperkuat oleh perkembangan politik di negeri Cina (Suryadinata dalam Faruk, 2000: 21).

Namun kenyataan membuktikan bahwa etnis Tionghoa yang keberadaannya di Jawa telah berlangsung ratusan tahun, pengaruhnya telah berakar di kalangan penduduk setempat. Etnis Tionghoa pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana mereka berdiam dan hidup rukun dengan penduduk setempat. Hubungannya dengan raja-raja dan Pangeran-pangeran Jawa dapat membahayakan posisi Belanda, oleh karena itu etnis Tionghoa harus digunakan untuk kepentingan Belanda. Untuk itulah mereka berpendapat bahwa tindakan pertama yang harus diambil adalah memisahkan etnis Tionghoa dari penduduk pribumi (Benny, 2004).

Mulai saat itu diberlakukan *wijkenstelsel*, peraturan yang mengharuskan orang-orang Tionghoa bermukim di tempat yang sudah ditentukan (*ghetto*) agar kegiatannya mudah diawasi. *Ghetto-ghetto* inilah yang kemudian berkembang menjadi *pecinan* (China Town). Untuk keluar atau berpergian dari daerah *pecinan*, mereka harus meminta izin dari penguasa Belanda terlebih dahulu yang diatur dalam sebuah peraturan yang disebut *passenstelsel*. Peraturan-peraturan yang sangat rasis ini menjadi awal politik segregasi Belanda untuk memisahkan etnis Tionghoa dengan penduduk setempat (Benny, 2004).

Pada masa pendudukan Jepang seperti yang digambarkan dalam teks CBK HSD, kehidupan etnis Tionghoa baik yang *totok* maupun peranakan mengalami nasib yang mengenaskan. Mereka dicurigai sebagai mata-mata sekutu yang terlibat dalam perang dunia II dengan sebutan ABCD (American-British-Chinese-Dutch). Jepang juga mewaspadaikan setiap gerak kehidupan etnis Tionghoa karena dendam historis karena Jepang pernah menyerang Tiongkok (CBK HSD: 279).

Nasib yang diterima warga etnis Tionghoa tidak berbeda jauh dengan yang diterima warga pribumi pada masa pendudukan Jepang. Hak-hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk etnis Tionghoa tidak didapatkan lagi. Banyak sekali pemuka-pemuka Tionghoa yang dimasukkan dalam penjara dan mendapat perlakuan yang sangat kejam. Mereka selalu diinterogasi seputar kegiatan selama di Indonesia.

Terdapat persamaan kasus menyangkut masalah perlakuan etnis Tionghoa pada masa pendudukan Jepang dengan yang terjadi pada masa rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Puncak kehancuran martabat dan jati diri etnis Tionghoa adalah di masa pemerintahan rezim militer pimpinan Jenderal Soeharto yang didukung AS, Inggris dan negara-negara kapitalis/imperialis lainnya. Pada masa penumpasan G 30 S ribuan etnis Tionghoa turut menjadi korban penangkapan dan pembunuhan dengan tuduhan “Baperki” atau ormas-ormas PKI lainnya. Sebenarnya mereka ditangkap hanya untuk diperas uangnya dan dirampas harta kekayaannya, karena seperti korban-korban penangkapan lainnya yang dituduh PKI, kaitannya dengan kegiatan G 30 S ternyata tidak terbukti sama sekali (Benny, 2004).

Pada masa pemerintahan Orde Baru keberadaan kelompok peranakan Tionghoa ini semakin parah dengan kebijaksanaan yang diterapkan oleh rezim Soeharto. Kecinaan selalu dijadikan kambing hitam. Minoritas Tionghoa dicap eksklusif, tidak mau berbaur, tahunya hanya berdagang, tidak punya nasionalisme, tidak peduli nasib bangsa, dan seterusnya. Labelisasi itu tentu tidak sepenuhnya tepat. Seharusnya, pemerintah melakukan introspeksi, bukankah kebijakan politik

diskriminatifnya sedikit banyak membuat WNI keturunan merasa sebagai warga kelas dua kendati mereka sudah tidak memiliki keterkaitan emosional maupun budaya dengan leluhur di Cina daratan (Yonky Karman dalam *Kompas*, 2003).

Selama pemerintahan Orde Baru entah berapa puluh kali terjadi aksi kekerasan anti Tionghoa, mulai dari Medan sampai ke Makassar, apalagi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bukan hanya kuantitas tetapi kualitas aksi kekerasan tersebut meningkat tanpa ada tindakan dari aparat keamanan. Terorisme telah dirasakan etnis Tionghoa sejak puluhan tahun yang lalu tanpa ada perlindungan sedikitpun dari pemerintah dan dunia internasional. Walaupun dari segi ekonomi etnis Tionghoa tampak makmur namun dalam kenyataannya sepanjang hidupnya dibayangi oleh rasa ketakutan. Jadi tidak dapat disalahkan apabila untuk berjaga-jaga yang mempunyai cukup uang menyimpan sebagian uangnya di luar negeri (Benny, 2004).

Peristiwa 13-14 Mei 1998 yang telah meluluh-lantakkan ribuan ruko, toko, rumah tinggal, pusat pertokoan, bengkel, apartemen, supermarket, kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua, bahkan juga perkosaan terhadap perempuan-perempuan Tionghoa di Jakarta dan Solo merupakan puncak kehancuran martabat dan jati diri etnis Tionghoa di Indonesia. Selama pemerintahan rezim Orde Baru secara terus-menerus terjadi kerusuhan anarkis anti Tionghoa namun kerusuhan Mei adalah puncak dari aksi kerusuhan tersebut. (Benny, 2004).

Banyak orang sebelumnya berpendapat bahwa kerusuhan anti Tionghoa tidak mungkin terjadi di Jakarta, tetapi ternyata menjelang keruntuhan rezim Orde

Baru, puncak kerusuhan tersebut justru dibiarkan berlangsung aparat keamanan di ibukota. Dengan kasat mata seluruh dunia dapat menyaksikan bagaimana kerusuhan yang berlangsung selama dua hari penuh, dibiarkan aparat keamanan tanpa melakukan suatu tindakan apapun. Jadi terbukti apa yang selama ini dkuatirkan, etnis Tionghoa memang dijadikan *bumper* dan 'tumbal' keruntuhan rezim Orde Baru pimpinan Soeharto.

Sungguh menyedihkan sekali melihat etnis Tionghoa demikian tidak berdaya menghadapi segala penindasan terhadap dirinya. Yang bisa dilakukan hanya menyelamatkan diri untuk sementara waktu ke luar negeri, atau ke tempat yang dirasa aman dan bagi mereka yang masih mempunyai uang, bagi yang tidak mempunyai uang sudah tentu hanya bisa pasrah atas semua kekerasan dan penderitaan yang menimpa dirinya tersebut. Keputusan untuk meninggalkan Indonesia sementara waktu menimbulkan penilaian yang negatif dari masyarakat pribumi. Mereka dihujat sebagai warga yang tidak mempunyai rasa nasionalis setelah mendapat keuntungan lalu pergi ke luar negeri.

Masyarakat Tionghoa yang barakulturasi selama ratusan tahun dengan penduduk pribumi masih melestarikan kebudayaan leluhurnya. Warga etnis Tionghoa dimana pun keberadaannya selalu terikat dalam satu keyakinan religi. Secara kedekatan emosional dengan tanah leluhur mungkin dapat luntur atau hilang sama sekali tetapi hal itu tidak akan terjadi pada nilai-nilai spiritual. Sebagai bangsa yang kebudayaannya termasuk tertua di dunia, Tionghoa tidak mudah terkontaminasi oleh arus moderenitas yang sedang berlangsung.

Dalam teks CBK HSD terdapat beberapa upacara untuk memperingati arwah leluhur, diantaranya;

1. perayaan Cio Ko merupakan perayaan untuk menyongsong hari 'maulid' dewa Tionghoa, Teng Gwan Tee Kwan. Upacara tersebut dikenal juga dengan sebutan 'sembahyang rebut-rebutan.' Orang-orang yang tergolong kaya merasa wajib menyumbang uang, makanan, candu yang ditaruh di dalam bakul-bakul khusus berhias segitiga disertai boneka-boneka wayang potehi yang dibuat dari tepung (CBK HSD: 36-37)
2. Perayaan Peh Cun merupakan perayaan untuk menghormati Hok Mo Hong nama malaikat penakluk iblis. Upacara tersebut biasanya memperebutkan hadiah di ujung-ujung bambu yang dihanyutkan di sungai. Hadiah tersebut berupa sapatangan dan sebungkus candu seharga 32 sen (CBK HSD: 69)
3. Perayaan Sin Cia merupakan perayaan tahun baru di kalender Tionghoa. Seperti kebanyakan tahun baru yang selalu dirayakan dengan pesta dan keramaian (CBK HSD: 128).

Ketiga upacara yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa begitu terikat dengan kekuatan kosmos dan mikrokosmos yang melingkupi kehidupan mereka. Kekuatan tersebut dipandang sebagai kekuatan yang melingkupi di luar diri manusia dan di dalam diri manusia yang keduanya merupakan bagian dari kekuatan alam. Penghormatan yang ditujukan pada kekuatan-kekuatan mistis diyakini akan dapat membawa berkah bagi perjalanan kehidupan masyarakat Tionghoa. Ciri mistis tersebut merupakan karakteristik kebudayaan timur secara umum.

Masyarakat Tionghoa baik *totok* maupun peranakan akan memperingati peringatan perayaan-perayaan hari besar maupun penghormatan terhadap dewa-dewa secara bersama-sama. Perayaan-perayaan tersebut pada perkembangannya sangat disesuaikan dengan konteks sosial yang menjadi tempat perantauannya. Pada umumnya hajatan selalu dilaksanakan di tempat ibadah semisal klenteng.

Pada masa kolonialisme Belanda perayaan-perayaan tersebut tumbuh sangat subur. Salah satu jalan pendekatan yang dilakukan Belanda untuk menarik simpati masyarakat Tionghoa adalah dengan jalan memberi kebebasan dalam mengekspresikan kebudayaan nenek moyangnya. Secara politis tindakan tersebut membawa nilai positif bagi pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Karena kedudukan etnis Tionghoa yang disejajarkan dengan bangsa kulit putih (Eropa) maka dalam hal apa pun selalu diberi ruang yang bebas. Dengan demikian terlihat bahwa perbedaan antara masyarakat Tionghoa dengan pribumi semakin lebar jika dilihat dari sisi gemerlapnya perayaan-perayaan tersebut.

Pada masa pendudukan Jepang hampir kegiatan yang berkaitan dengan ritual perayaan hari besar bagi warga Tionghoa tidak terlihat. Kebijakan Jepang mempersempit ruang gerak bagi masyarakat Tionghoa untuk mengekspresikan perayaan dan ritual untuk menghormati nenek moyang. Pada fase pendudukan Jepang hampir semua sendi kehidupan masyarakat Tionghoa menemui jaiian buntu.

Pola-pola diskriminatif terhadap etnis Tionghoa juga terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama. Meskipun hal tersebut tidak sampai mematikan ruang gerak masyarakat Tionghoa. Di masa pemerintahan presiden Soekarno walaupun

beberapa kali terjadi usaha-usaha untuk melakukan tindakan diskriminatif. Pada masa itu etnis Tionghoa dengan bebas dapat mempertahankan dan merayakan tradisi, adat-istiadat dan kepercayaannya dengan bebas. Demikian juga bahasa Tionghoa/Mandarin dengan bebas dapat dipergunakan baik lisan maupun tertulis. Hubungan etnis Tionghoa dengan penduduk setempat cukup harmonis dan tidak terdengar adanya pertikaian etnis (Benny, 2004).

Persoalan yang terjadi pada masa Orla lebih pada pengembalian jati diri bangsa Indonesia. Atas dasar asas kebhinekaan, presiden Soekarno ingin mengembalikan identitas nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kebijakan presiden Soekarno adalah mengganti semua nama yang berbau asing menjadi nama yang bercirikan Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam peraturan pemerintah yang dilaraskan dari pidato presiden Soekarno, MANIPOL (Manifesto Politik) pada 1959, dan disahkan oleh DPA tentang kembali kepada kepribadian dan kebudayaan nasional (CBK HSD: 383). Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan China pada masa Orla terbina sangat baik. Masa Orla terjadi poros politik antara Jakarta dengan Peking yang menyebabkan keharmonisan hubungan kedua negara. Jika ditelusuri lebih lanjut bahwa kedua negara pada waktu itu dapat dikatakan sangat dekat hubungan luar negerinya dengan Uni Soviet (sekarang Rusia) yang menjadi musuh utama Amerika dan sekutunya.

Pada masa Orba perihal identitas yang harus disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia semakin ketat dan mencakup semua bidang, tidak hanya nama perseorangan saja. Seperti yang diceritakan oleh Jono Anto Wiyono

bahwa ada aturan harus ganti nama bagi keturunan Tionghoa. Sehingga rata-rata warga Tionghoa memiliki dua nama. Selain nama asli juga ada nama panggilan baru *ala* Indonesia. Jono mempunyai nama asli Liem Ou Yen. Lebih lanjut menurut penuturannya bahwa sebutan 'Cina' merupakan salah satu usaha untuk membatasi ruang gerak warga Tionghoa. Penggunaan kata Cina sangat kurang menghormati bangsa Tionghoa. Sebenarnya sebutan Cina hanya ada di Indonesia dan secara internasional seharusnya China dari nama *Republik of China*. Sebutan Cina merupakan produk Orba (Liem Ou Yen dalam Mossaik, 2004: 13).

Dede Oetomo dalam laporannya menyebutkan bahwa pada tahun 1967, adanya kebijakan yang mengandung unsur pemudalaran penggantian nama. Nama Tionghoa harus diganti dengan nama yang lebih berbunyi Indonesia (lokal atau nasional). Kebijakan tersebut pada akhirnya menghasilkan kekaburan identitas Tionghoa dalam ranah-ranah tertentu dan setidak-tidaknya pada awal interaksi. Seorang Tionghoa tidak akan dapat diketahui ketionghoannya jika seseorang tersebut tidak menyebut nama aslinya yang merupakan nama Tionghoa (Dede Oetomo dalam *Majalah FISIP Universitas Airlangga*, 1989: 69).

Masyarakat Tionghoa kembali dihadapkan pada sekat-sekat yang menghantui kehidupan berbudaya oleh rezim Orba. Rezim Orba melarang semua kegiatan yang berbau Tionghoa tampil kepermukaan. Perayaan-perayaan hari besar dan ritual penghormatan terhadap leluhur harus dilakukan secara tertutup dan untuk kalangan sendiri. Rezim Orba memberangus semua aktivitas yang berkaitan dengan budaya Tionghoa karena kecurigaan tentang 'bahaya komunisme'. Dengan dasar ini Soeharto menaruh curiga terhadap etnis Tionghoa

di Indonesia masih terus menjalin hubungan erat dan masih terikat dengan negeri leluhur mereka yang komunis. Soeharto menciptakan ketakutan sendiri tentang bahaya komunis yang tidak terbukti pada kehadiran etnis Tionghoa. Pada tahun 1980 telah terbit Keputusan Bersama Mendagri dan Jaksa Agung RI Nomor 67 Tahun 1980, 224 Tahun 1980, Kep. III/JA/10/1980 tentang Juklak Inpres Nomor 14 Tahun 1967 yang berisi tentang pelarangan segala penyelenggaraan kebudayaan dan agama asli Cina.

Teguh Prabowo (Go Tjong Ping) dalam pengakuannya menyampaikan bahwa pada masa rezim Orba dirinya pernah mengalami pemeriksaan oleh aparat militer (Korem) selama empat belas hari. Pada waktu itu dia dianggap melanggar hukum dengan menggelar acara Imlek dengan atraksi Barongsai dan Liang Liong di halaman klenteng Kwan Sing Bio meskipun ijin acara tersebut telah diberikan oleh pemerintah kabupaten Tuban. Selama masa pemeriksaan tersebut tidak jelas apa yang menjadi permasalahan sehingga dirinya harus ditahau demikian lama (Go Tjong Ping dalam *Mosaik*, 2004: 11-12).

Jika diperhatikan kehidupan masyarakat peranakan Tionghoa menyangkut kehidupan sosial dan budaya pada awal kedatangannya dapat hidup berdampingan dengan masyarakat pribumi dengan damai. Keadaan tersebut berubah ketika Belanda mulai memasuki Indonesia dengan membawa 'misi' *divide at impera* yang tidak hanya diperuntukkan bagi pribumi melainkan juga untuk masyarakat Tionghoa. Proses alamiah akulturasi menjadi semacam proses yang 'haram' bagi dua kutub budaya yang berbeda.

Perlakuan-perlakuan diskriminatif yang terjadi pada masyarakat peranakan Tionghoa lebih disebabkan pada kecurigaan yang tidak mendasar. Kecurigaan tersebut lebih pada ketakutan sejarah yang akan membahayakan kedudukan penguasa rezim tertentu. Ketakutan yang 'dibuat-buat' tersebut menyebabkan masyarakat peranakan Tionghoa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan bagi kelangsungan hidupnya sebagai manusia yang mempunyai nilai sosial dan budaya.

3.2 Refleksi Kehidupan Etnis Tionghoa Dalam Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi teks CBK HSD melalui tokoh tokoh yang dihadirkan memperlihatkan mayoritas dari mereka adalah seorang pengusaha. Mereka bergerak dalam bidang perdagangan tembakau dan candu yang terpusat di Glodok Jakarta. Pada masa kolonialisme Belanda etnis Tionghoa diberi keleluasaan untuk mengolah tanah di Hindia Belanda dengan sistem sewa tanah yang pembagian hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan pemerintah kolonial. Untuk penyewa tanah biasanya disebut *pachter* (CBK HSD: 38).

Kebijakan dalam bidang ekonomi yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda terhadap pengusaha Tionghoa dengan memberi hak-hak istimewa menyebabkan terjadinya perlawanan dari pribumi (bumiputra). Pada tahun 1911 didirikan perkumpulan Sarekat Islam di Sala. Perkumpulan SI bertujuan mengadakan persaingan terhadap perdagangan-perantara orang-orang Tionghoa (LRKN, 1984: 212). Dari persaingan dagang tersebut dapat dilihat keberhasilan Belanda dalam menerapkan politik *divide at impera* yang mempertemukan dua

etnis yang berbeda dalam kondisi yang berlawanan. Keharmonisan hubungan antara etnis Tionghoa dengan pribumi pada akhirnya terusik dengan adanya persaingan dibidang ekonomi.

Jika kembali ke zaman orde lama, diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa terjadi ketika Menteri Kemakmuran Djuanda pada tahun 1950 mengeluarkan politik Benteng yang bertujuan untuk memperkuat kedudukan ekonomi pengusaha pribumi. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa para pedagang (importir) pribumi kalah bersaing dengan importir Tionghoa. Melalui kebijakan Benteng pemerintah memberikan kredit murah dan lisensi untuk mengimpor barang-barang tertentu pada importir pribumi. Kemudian tahun 1959, pemerintah mengeluarkan PP No. 10 tahun 1959 yang isinya melarang orang-orang Tionghoa asing berdagang di tingkat kabupaten ke bawah (Benny, 2000).

Diterbitkannya PP tersebut memperlihatkan gerak ekonomi etnis Tionghoa pada masa Orla menjadi terbatas kalau tidak dapat dikatakan mematikan usaha mereka. Etnis Tionghoa sebagai perantau yang mencari kehidupan baru di Indonesia, selama ratusan tahun selalu menjadi pelengkap penderita, walaupun kedatangan etnis Tionghoa di negara-negara yang menjadi pilihannya semata-mata bertujuan mencari kehidupan baru atau memajukan perdagangan tanpa sedikitpun melakukan kekerasan, apalagi dengan tujuan-tujuan untuk menjajah seperti yang dilakukan bangsa-bangsa kulit putih.

Pada masa rezim Orba semua aktivitas etnis Tionghoa dibatasi dan hanya difokuskan pada bidang ekonomi. Akibat 'kebijakan' tersebut mengakibatkan warga Tionghoa hanya terfokus pada satu bidang yaitu ekonomi. Posisi etnis

Tionghoa semakin rendah di mata pribumi yang menyebut mereka adalah orang-orang *apolitis* dan hanya mementingkan kekayaan materi yang didapat dari tanah milik pribumi. Sedangkan bagi penguasa rezim Orba kekayaan materi etnis Tionghoa dapat dijadikan 'lumbung' kekayaan pribadi. Adanya berbagai macam pungutan liar dengan alasan untuk jaminan keamanan bukan hal baru dalam perjalanan Indonesia di bawah cengkraman Rezim Orba pimpinan Soeharto.

Etos kerja masyarakat Tionghoa di Indonesia patut dicermati dalam gerak perdagangan (bisnis). Masyarakat Tionghoa memiliki etos kerja mereka yang *ulet* dan tidak mengenal menyerah. Mereka berani menempuh resiko sebesar apapun termasuk berhadapan dengan pebegak hukum. Segala daya upaya akan dilakukan untuk memperlancar usaha mereka. Mereka beranggapan bahwa persaingan bisnis adalah hal yang wajar termasuk menggunakan berbagai cara untuk saling menjatuhkan saingan bisnis.

Di dalam teks CBK HSD digambarkan persaingan bisnis antara Tan Peng Liang (Semarang) dengan Thio Boen Hiap. Mereka sama-sama mempunyai ambisi untuk saling menjatuhkan. Lebih menarik lagi adalah usaha mereka untuk memanfaatkan peranan pers dalam persaingan bisnis tersebut (CBK HSD: 165-177). Tan Peng Liang (Semarang) bahkan 'mengobarkan perang' terhadap pers yang dianggapnya tidak berada dipihaknya. Bahkan Tan Peng Liang (Semarang) menyuruh kemenakannya Tan Soen Bie untuk melakukan penganiayaan terhadap Jan Max Awuy juruwarta koran Betawi Baroe (CBK HSD: 190-191).

Permusuhan antara Tan Peng Liang (Semarang) dengan koran Betawi Baroe mengingatkan kita pada kejadian beberapa waktu lalu yang juga melibatkan dunia

pers. Masih hangat dalam ingatan perseteruan antara majalah *Tempo* dengan Tomy Winata yang sempat mengundang keprihatinan bagi kalangan insan pers di Indonesia. Tomy Winata adalah taipan muda dan digdaya berusia empat puluh tiga tahun, ketekunannya dalam menjalankan bisnis selama sepuluh tahun menyebabkan imperium bisnisnya berkembang pesat. Tommy Winata mempunyai tiga kunci sukses dalam mengembangkan bisnisnya yaitu: uang, kekuasaan, dan militer. Seperti Liem Sio Liong yang bertemu Soeharto, atau Bob Hasan bertemu Gatot Soebroto, Tommy beruntung mengenal Jenderal Tiopan Bernard Silalahi, mantan Sekjen Departemen Pertambangan dan Energi serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Kabinet Pembangunan VI Soeharto (*Kompas*, 2002)

Junito Drias dalam laporannya mengatakan bahwa pers Indonesia sekarang punya sandungan baru. Namanya pengerahan massa. Entah itu gerombolan pendukung, milisi partai atau pun sekelompok orang bayaran, intinya mereka bisa sampai merusak, menganiaya, bahkan mungkin membunuh. Polisi Indonesia pun terkesan jeri terhadap aksi ini, buktinya selalu membiarkan aksi kekerasan itu, sekali pun semua itu terjadi di depan mata mereka. Inilah yang dialami majalah *Tempo* yang memberitakan hubungan Tommy Winata dengan kebakaran pasar Tanah Abang. Karena tidak suka dengan pemberitaan tersebut orang-orang Tommy Winata meluruk ke kantor *Tempo* dan melukai salah seorang wartawan. (Junito Drias, 2003).

Laporan di atas menggambarkan bahwa seorang Tommy Winata bisa berbuat 'sesuka hatinya' karena dia memegang semua jalur kekuasaan dan dekat

dengan sumber kekuasaan. Kondisi inilah yang menyebabkan Tommy bebas bergerak dan memainkan 'peranannya' dalam 'mengatur' semua keinginan bisnis yang menjadikan peluangnya untuk terus maju. Kejadian yang menimpa majalah *Tempo* merupakan kasus 'kecil' yang dengan mudah akan dilaluinya. Hal tersebut dalam kenyatannya memang demikian. Kalaupun ada penangkapan terhadap Tommy oleh aparat kepolisian hal itu tidak lebih daripada 'akting' yang memang harus diperankan untuk kepuasan publik, selebihnya adalah nol besar. Tidak mudah bagi aparat kepolisian untuk menangkap apalagi menahan orang sekelas Tommy Winata yang demikian 'berjasa' bagi militer. Usaha-usaha tersebut akan selalu membentur dan berhenti pada lingkaran kekuasaan yang demikian kuat telah dibangunnya lewat 'sumbangan' materi.

Kembali pada Tan Peng Liang (Semarang) dalam CBK HSD yang melarikan diri ke Makao karena usahanya dalam percetakan uang palsu yang dipergunakan untuk memenangkan persaingan bisnis dengan Thio Boen Hiap terbongkar. Dia berhasil melarikan diri dari penjara dengan 'lancar' tidak terlepas dari kebiasaannya menyuap untuk keberhasilan usaha yang diinginkannya. Dia berhasil mendapatkan 'kerjasama' dengan kepala penjara setelah memberi imbalan uang 'pelicin' (CBK HSD: 216-217). Setelah berhasil melarikan diri ke Makao, Tan Peng Liang (Semarang) cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya dan dalam waktu yang relatif singkat dia berhasil mengirim modal untuk usaha keluarganya yang ditinggal di Batavia berupa berkilo-kilogram candu. Hal tersebut diceritakan dalam sub bab judul *Peti Mati* (CBK HSD: 249-255).

Kisah pelarian Tan Peng Liang (Semarang) ke luar negeri kembali mengingatkan kita pada kasus memalukan tentang kaburnya Edy Tanzil yang telah merugikan negara sebesar 1,3 trilyun rupiah. Pelarian tersebut dicurigai melibatkan sipir penjara dimana Edy Tanzil dipenjara. Yang sangat memalukan dari kaburnya Edy Tanzil adalah tidak adanya upaya dari aparat penegak hukum Indonesia untuk melacak keberadaannya. Hal tersebut semakin memperkuat dugaan keterlibatan elit penguasa di tingkatan atas, tidak hanya sipir. Sibir penjara dapat dikatakan hanya 'berperan sebagai bidak catur yang dikorbankan untuk keselamatan sang raja'.

Permadi pernah mengungkapkan kepada anggota Komisi I mengenai penanganan kasus manipulasi bos Bank Harapan Sentosa, Hendra Rahardja yang dikabarkan mati di Australia. "Jangan sampai Polri ditipu konglomerat hitam untuk menghilangkan jejak untuk tujuan mengelak dari tindak pidana korupsi. Informasi meninggalnya Hendra Rahardja itu harus teliti betul, benarkah yang meninggal itu memang Hendra Rahardja. Jangan-jangan itu hanya upaya untuk mengelabui aparat hukum." Kata Permadi. Permadi lebih lanjut menyampaikan bahwa bisa saja hal tersebut terjadi seperti kasus kaburnya Edy Tanzil dari penjara. "Skenario itu, pernah digunakan oleh buronan Eddy Tanzil yang membobol Bapindo Rp 1,3 triliun. Eddy Tansil itu memiliki saudara yang sangat mirip. Itulah yang dimasukkan ke LP Cipinang, sedangkan Eddy Tansil pergi begitu saja," Ujar Permadi (*Suara Karya*: 2000).

Dari kedua relasi cerita tersebut dapat dilihat adanya semacam permainan yang melibatkan sejumlah uang sebagai media untuk kepentingan tertentu. Antara

Tan Peng Liang (Semarang) dengan Edy Tanzil serta Hendra Rahardja mengingatkan akan keadaan 'dekadensi' moral yang menghinggapi para aparat penegak hukum sekaligus elit penguasa. Dengan mudah segala urusan kejahatan akan cepat 'menguap' karena adanya permaianan uang. Sedangkan yang selalu menjadi korban adalah para bawahan yang mau tidak mau, terpaksa tidak terpaksa harus menerima dirinya sebagai kambing hitam permainan para elit penguasa.

3.3 Refleksi Kehidupan Etnis Tionghoa Dalam Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan telah digambarkan dalam teks CBK HSD bahwa tingkat pendidikan etnis Tionghoa lebih tinggi daripada pribumi yang kebanyakan buta huruf. Bagi masyarakat Tionghoa untuk menjadi manusia tidak hanya dibutuhkan naluri tetapi kekuatan nalar yang dapat menggerakkan semua aktivitas kehidupan dengan terencana. Dengan ilmu pengetahuan bagi masyarakat Tionghoa yang hanya dapat membedakan manusia dengan binatang.

Pendidikan tersebut sejak dini telah ditumbuhkan lewat lingkup paling kecil yaitu keluarga. Bagi masyarakat Tionghoa ilmu pengetahuan merupakan petunjuk arah dalam mengarungi kehidupan. Seperti peranan Tan Tiang Tjing, ayah Tan Peng Liang (Semarang) yang berhasil mendidiknya menjadi orang yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain (CBK HSD: 37). Didikan ayahnya tersebut diteruskan Tan Peng Liang (Semarang) kepada anak-anaknya supaya siap menghadapi kehidupan yang sangat keras (CBK HSD: 384). Pendidikan yang bersifat informal ini memegang peranan penting bagi keluarga Tionghoa untuk membentuk dan mempersiapkan generasi penerusnya sebagai generasi yang siap

menatap dunia setelah lepas dari keluarga dengan tidak menggantungkan hidup pada orang lain.

Pendidikan yang ditekankan dalam keluarga Tan Peng Liang (Semarang) seperti halnya dengan yang dilakukan oleh Alim Markus, seorang pengusaha yang sukses dengan imperium bisnisnya sangat luas. Dia adalah pemegang sekaligus penentu jalannya 'kerajaan bisnis' Maspion yang bergerak dalam bidang produk yang dekat dengan ibu-ibu rumah tangga seperti panci, teflon, termos plastik, kulkas, dan lain-lain. Bidang bisnis kedua adalah konstruksi material dan industri. Salah satu kebanggaan grup Maspion di bidang properti adalah kesuksesannya membangun Kawasan Industri Maspion seluas 300 hektar dekat Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Maspion juga merambah bisnis keuangan dengan bank Maspion (Mossaik, 2004: 69-70).

Keberhasilan Alim Markus tersebut tidak didapat dengan tiba-tiba atau berharap pada 'bintang jatuh' saja tetapi melalui usaha keras dan didikan dari orang tuanya. Alim Markus dalam wawancara mengatakan bahwa selama ini prinsip-prinsip yang dia pegang dalam menjalankan bisnisnya merupakan didikan langsung dari orang tuanya, khusus sang ayah Alim Husin (almarhum). Peran ayahnya demikian besar dalam keluarga. Bagi Alim Markus ayahnya merupakan contoh yang sangat mulia budinya termasuk tingkah lakunya. Sejak kecil, dia sudah diajari mandiri dan dipacu untuk mempelajari bahasa Jepang, mandarin, dan lainnya. Di usia limabelas tahun Alim Markus memulai proses belajar sendiri dengan memanggil guru *privat* di rumah. Melalui ayahnya juga Alim Markus dinasehati dengan mengatakan bahwa usaha ayahnya harus maju kalau tidak

begitu mereka akan menjadi bahan ejekan pamannya yang juga seorang pengusaha oleh sebab itu Alim Markus kecil sudah 'bersentuhan' langsung dengan bisnis (Alim Markus dalam Mossaik, 2004: 69-72).

Alim markus dalam mendidik anak-anaknya hampir sama seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Dia berprinsip bahwa anak-anaknya harus sekolah sampai pendidikan yang paling tinggi. Anak-anaknya selalu dididik menjadi manusia yang baik dan tidak bergantung pada orang lain serta bersikap hemat sebelum mereka dapat mencari keuntungan sendiri. Dia membimbing dan mengarahkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang kelak dapat 'berdiri di atas kaki' mereka sendiri dengan jalan tidak memanjakan mereka sewaktu muda. Prinsip yang juga diajarkan pada anak-anaknya adalah berusaha mulai dari bawah, dari tidak punya apa-apa sampai pada kehidupan yang benar-benar diinginkan (Mossaik 72-73). Demikian pendidikan informal dalam keluarga peranakan Tionghoa yang benar-benar menuntut disiplin dan kerja keras mulai dari kecil.

Sedangkan pada perkembangan pendidikan formal pada masa pemerintahan kolonial Belanda telah berdiri berbagai macam sekolah. Leo Suryadinata melihat bahwa di Indonesia telah berdiri organisasi Tiong Hoa Hwee Koan (THHK). THHK mendirikan sekolah-sekolah berbahasa pengantar Cina di seluruh Jawa. Gerakan Pan-Cina berkembang dengan pesat. Dr Sun Yat Sen membuka taman-taman bacaan untuk memperluas doktrin-doktrin revolusionernya. Taman-taman bacaan itu tidak hanya menyediakan bahan-bahan bacaan tetapi juga menyelenggarakan ceramah dan diskusi yang menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa perantara (Suryadinata dalam Faruk, 2000: 22). Berdirinya ratusan

sekolah-sekolah Tionghoa yang juga mengajarkan kembali nilai-nilai budaya Tionghoa (resinifikasi) dengan cepat membangkitkan semangat nasionalisme Tiongkok di kalangan masyarakat Tionghoa.

Perkembangan sekolah-sekolah T.H.H.K. dan tumbuhnya nasionalisme Tiongkok di kalangan masyarakat Tionghoa, ditambah dengan usaha-usaha pemerintah Kerajaan Tiongkok untuk mendekati para perantau Tionghoa menimbulkan keawatiran pemerintah kolonial Hindia Belanda. Untuk mengantisipasinya, dibentuk Biro Urusan Tionghoa yang bertugas memberikan masukan dan nasihat kepada pemerintah untuk melaksanakan politik yang tepat dalam menghadapi masalah Tionghoa. Anggota Biro ini antara lain L.H.W. van Sandick dan P.H.Fromberg yang kemudian mendesak pemerintah agar membuka sekolah-sekolah untuk anak-anak Tionghoa. Pada tahun 1907, pemerintah kolonial Hindia Belanda membuka Holland Chineesche School (HCS) dan kemudian sekolah-sekolah lanjutan antara lain MULO, HBS, HCK dan sebagainya. Sekolah-sekolah ini berhasil menarik minat golongan peranakan yang berpendapat lulusan sekolah Belanda ini lebih mudah memperoleh pekerjaan. Dengan dibukanya sekolah-sekolah berbahasa pengantar Belanda ini, pemerintah kolonial Hindia Belanda berhasil mempertajam perpecahan di antara golongan peranakan dan *totok* (Benny, 2004).

Pada masa rezim Orba pendidikan sektor formal bagi masyarakat peranakan Tionghoa hampir pasti dapat dikatakan kondisinya sangat memprihatinkan. Kebijakan yang diatur dalam politik kebudayaan Indonesia terhadap golongan etnis Tionghoa sesudah 1965 adalah penutupan sekolah-sekolah berbahasa

pengantar Tionghoa. Setelah itu dibentuk Sekolah-sekolah National Projek Khusus (SNPC), di sana bahasa Tionghoa diajarkan dan berakhir pada tahun 1975 ketika Menteri Pendidikan Indonesia waktu itu, Mashuri menghapusnya sama sekali (Dede Oetomo, 1989: 67).

Pendidikan bagi masyarakat peranakan Tionghoa begitu penting dan menjadi semacam hukum wajib bahwa setiap anak harus merasakan pendidikan. Pendidikan tersebut biasanya dimulai dari lingkungan informal yaitu, keluarga. Masyarakat peranakan Tionghoa menilai bahwa pendidikan keluarga merupakan sarana paling cepat dan tepat untuk menjadikan anak sebagai manusia-manusia yang siap menghadapi kehidupan yang serba keras dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi. Dalam perkembangan pendidikan formal masyarakat peranakan Tionghoa sempat merasakan pendidikan yang sangat moderen pada waktu itu. Meskipun dalam perjalanan waktu mereka kembali dihadapkan pada kekuasaan yang tidak berpihak pada mereka dan cenderung 'menghabisi'.

3.4 Peranan Etnis Tionghoa Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan dan Setelah Kemerdekaan Indonesia

Selain ketiga bidang yang telah dianalisis di atas, tidak dapat diabaikan pula peranan masyarakat peranakan Tionghoa dalam membantu perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Dalam teks CBK HSD, peranan Tan Peng Liang (Semarang) dalam mengusahakan persenjataan bagi pejuang Indonesia merupakan contoh konkret bantuan tersebut (CBK HSD: 340 dan 360). Tan Tian Tjing, ayah Tan Peng Liang (Semarang) juga pernah membantu dana pergerakan organisasi

nasionalis yang berakibat dia dipenjara oleh Belanda (CBK HSD: 103). Sebenarnya perlawanan fisik masyarakat peranakan Tionghoa terhadap kolonial Belanda sudah pernah terjadi.

Pemerintah kolonial Belanda dengan segala upaya untuk terus mengadakan politik 'pecah belah' untuk meruntuhkan dan memperlebar jarak antara Tionghoa *totok* dengan peranakan Tionghoa. Keadaan demikian pada akhirnya membangkitkan semangat perlawanan dari peranakan Tionghoa untuk melawan ketidakadilan yang diterimanya selama ini. Perlawanan tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak dulu yang dilatari oleh adanya pembantaian etnis Tionghoa khususnya peranakan.

Pada tahun 1740 terjadi pembunuhan massal terhadap orang Tionghoa di Batavia. Penguasa Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier mengeluarkan peraturan *permissiebriefje* atau surat ijin menetap bagi orang Tionghoa dan sebuah Resolusi "bunuh atau lenyapkan" Resolusi ini memerintahkan bahwa semua orang Tionghoa yang "mencurigakan" tanpa peduli apakah mereka mempunyai surat ijin atau tidak, harus ditangkap dan diperiksa, apabila ternyata tidak mempunyai penghasilan atau menganggur, harus pulang ke Tiongkok atau dibuang ke Cylon (Sri Lanka) dan ke Tanjung Harapan untuk bekerja di perkebunan dan pertambangan sebagai kuli. Orang-orang Belanda dengan serdadu bayarannya dengan dibantu para budak, kelasi kapal dan gelandangan memburu orang-orang Tionghoa dari rumah ke rumah.

Setiap orang Tionghoa yang ditemuinya, tidak peduli laki-laki atau perempuan, tua maupun muda, bahkan anak-anak dan bayi yang sedang menyusu

dibantai dengan sadis dan di luar batas peri kemanusiaan. Aksi pembunuhan tersebut berlangsung selama dua minggu dan menelan korban lebih dari 10.000 orang etnis Tionghoa. Seluruh etnis Tionghoa yang tinggal di dalam kota oleh orang-orang Belanda telah disapu bersih. Inilah peristiwa pembunuhan massal yang pertama sepanjang sejarah terhadap perantau Tionghoa yang dilakukan secara brutal (Benny, 2004).

Menyusul peristiwa pembunuhan massal itu, sebagian pemuda-pemuda Tionghoa yang berhasil meloloskan diri merasa harga dirinya diinjak-injak dan semangatnya bangkit kembali untuk melawan perbuatan sewenang-wenang tersebut. Mereka kemudian berangkat ke Jawa Tengah untuk bergabung dengan orang-orang Tionghoa di sana yang marah atas kejadian tersebut dan membentuk pasukan-pasukan perlawanan terhadap Belanda. Kemudian mereka bersekutu dengan Sunan Paku Buwono II dan Pangeran-pangeran Jawa yang anti Belanda. Mereka berhasil mengepung pasukan Belanda di kota Semarang sampai berbulan-bulan lamanya. Mereka juga berhasil membakar kraton Kartasura ketika Sunan Paku Buwono II berkhianat dan memihak Belanda. Kalau saja tidak dibantu oleh Pangeran Adipati Cakraningrat IV dari Madura, pasukan Belanda pasti berhasil diusir dari Jawa dan jalannya sejarah akan berbeda. Setelah berlangsung tiga tahun lamanya, pemberontakan etnis Tionghoa bersama etnis Jawa tersebut berhasil ditumpas (Benny, 2004).

Peran serta peranakan Tionghoa juga dapat dilihat dalam gerak organisasi kepemudaan pada ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang menjadi tonggak historik pertama kesadaran berbangsa satu. Ketika Sumpah Pemuda dideklarasikan,



dibantai dengan sadis dan di luar batas peri kemanusiaan. Aksi pembunuhan tersebut berlangsung selama dua minggu dan menelan korban lebih dari 10.000 orang etnis Tionghoa. Seluruh etnis Tionghoa yang tinggal di dalam kota oleh orang-orang Belanda telah disapu bersih. Inilah peristiwa pembunuhan massal yang pertama sepanjang sejarah terhadap perantau Tionghoa yang dilakukan secara brutal (Benny, 2004).

Menyusul peristiwa pembunuhan massal itu, sebagian pemuda-pemuda Tionghoa yang berhasil meloloskan diri merasa harga dirinya diinjak-injak dan semangatnya bangkit kembali untuk melawan perbuatan sewenang-wenang tersebut. Mereka kemudian berangkat ke Jawa Tengah untuk bergabung dengan orang-orang Tionghoa di sana yang marah atas kejadian tersebut dan membentuk pasukan-pasukan perlawanan terhadap Belanda. Kemudian mereka bersekutu dengan Sunan Paku Buwono II dan Pangeran-pangeran Jawa yang anti Belanda. Mereka berhasil mengepung pasukan Belanda di kota Semarang sampai berbulan-bulan lamanya. Mereka juga berhasil membakar kraton Kartasura ketika Sunan Paku Buwono II berkhianat dan memihak Belanda. Kalau saja tidak dibantu oleh Pangeran Adipati Cakraningrat IV dari Madura, pasukan Belanda pasti berhasil diusir dari Jawa dan jalannya sejarah akan berbeda. Setelah berlangsung tiga tahun lamanya, pemberontakan etnis Tionghoa bersama etnis Jawa tersebut berhasil ditumpas (Benny, 2004).

Peran serta peranakan Tionghoa juga dapat dilihat dalam gerak organisasi kepemudaan pada ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang menjadi tonggak historik pertama kesadaran berbangsa satu. Ketika Sumpah Pemuda dideklarasikan,

memang tidak ada wakil dari organisasi Tionghoa. Namun, dalam kongres itu tercatat kehadiran seorang pemuda, Kwee Thiam Hong alias Daud Budiman, mewakili Jong Sumatranen Bond. Sedangkan pada proklamasi kemerdekaan yang menjadi tonggak historik kedua dan menjadi titik balik perjuangan kemerdekaan Indonesia terdapat wakil dari peranakan Tionghoa. Dalam konteks itu, ada Yap Tjwan Bing dari Partai Nasional Indonesia menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia itu dibentuk untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia dan mengambil langkah-langkah guna membuat suatu negara. PPKI itulah yang mengesahkan UUD 1945, 18 Agustus 1945 (Kompas, 2003).

Pada masa setelah kemerdekaan peranan peranakan Tionghoa tidak berhenti pada perlawanan terhadap penjajahan asing, tetapi juga bentuk-bentuk ketidakadilan yang disebabkan oleh penguasa dalam negeri sendiri. Lembaran sejarah bangsa kita juga pernah mencatat kiprah Soe Hok Gie, seorang demonstran tahun 1966, adik kandung Arief Budiman. Arif Budiman juga dikenal sebagai arsitek Golput yang selama rezim Orde Baru tetap bersikap kritis. Almarhum Soe Hok Gie merupakan salah seorang tokoh kunci terjadinya aliansi antara mahasiswa dan ABRI pada tahun 1966 yang menumbangkan rezim Soekarno lewat aksi-aksi massa yang melahirkan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat). Selain dikenal sebagai demonstran dan penulis yang kritis, Soe Hok Gie juga aktif pada organisasi golongan peranakan, LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa), yang memperjuangkan proses integrasi (J Anto, 2002).

Soe Hok Gie setamat dari UI kemudian memilih menjadi dosen pada almamaternya. Soe Hok Gie menolak bergabung bersama teman-temannya yang

sebagian memilih menjadi anggota DPR-GR akibat andil angkatan 66 dalam menggulingkan Soekarno. Soe Hok Gie lebih suka memilih berjuang dari luar agar bisa menjaga sikap kritisnya. Sikap kritis Soe Hok Gie selain diperlihatkan melalui tulisan-tulisannya yang dipublikasikan berbagai media, juga dilakukan melalui aksi pengiriman bedak dan cerminnya kepada para aktivis yang menjadi anggota DPR-GR (J Anto, 2002). Penjelasan tersebut adalah fakta yang menunjukkan peranan yang begitu penting dari masyarakat peranakan Tionghoa dalam perjalanan republik ini yang masih berusia sangat muda dan terus berkembang, bergerak bersama bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Akulturasinya antara etnis Tionghoa dengan pribumi memperlihatkan posisi yang tidak menguntungkan bagi etnis Tionghoa khususnya peranakan. Hal tersebut terjadi karena permainan-permainan politik dari masa kolonial Belanda sampai masa rezim Orba. Sebenarnya terjadinya pelapisan atau tingkatan sosial yang terjadi dalam etnis Tionghoa tidak hanya disebabkan oleh proses akulturasi melainkan campur tangan Belanda.

Pemerintah kolonialisme Belanda telah memecah kesatuan etnis Tionghoa dalam kantong-kantong sosial tersendiri. Keadaan tersebut sangat tidak menguntungkan bagi keberadaan peranakan Tionghoa yang berdiri di tengah-tengah masyarakat yang sudah jelas identitas budayanya. Di satu sisi peranakan Tionghoa dihadapkan pada Tionghoa *totok* yang menghina keberadaannya sebagai warga rendahan. Di sisi yang lain peranakan Tionghoa selalu dibenci kehadirannya oleh pribumi akibat dari tindakan politis pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda juga telah mengusik keharmonisan

hubungan antara etnis Tionghoa dengan pribumi. Dengan potensi sumberdaya manusia yang dimiliki etnis Tionghoa menjadi semacam komoditi untuk keuntungan Belanda di Hindia Belanda.

Penderitaan peranakan Tionghoa tidak berhenti pada masa kolonial Belanda melainkan sampai awal kemerdekaan Indonesia. Penilaian yang dilakukan oleh masyarakat pribumi menempatkan peranakan Tionghoa pada posisi yang terjepit. Hal tersebut seakan menghilangkan peranan peranakan Tionghoa yang sedikit banyak ikut membantu perkembangan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pola-pola diskriminatif selalu menghampiri di setiap sendi kehidupan peranakan Tionghoa. Peranakan Tionghoa sendiri secara emosional telah lepas dari tanah leluhur dan hanya keyakinan religi saja yang mengikat mereka dengan leluhurnya, Tiongkok.

Sesuai dengan yang dicita-citakan oleh *foundingfather* bangsa Indonesia yang menginginkan 'keekaan dalam kebhinnekaan'. Bahwa Indonesia tidak akan dapat berkembang dan maju selama yang dipermasalahkan adalah perbedaan yang mendasarkan pada keetnisan atau bentuk-bentuk diskriminatif lainnya. Kesadaran terhadap penerimaan perbedaan lebih dipentingkan untuk menatap dan membangun bangsa yang sudah sekian lama hancur oleh mesin-mesin penjajah. Pola-pola rasial dan deskriminatif yang menyudutkan salah satu etnis tertentu telah lewat masanya dan tidak 'laku' lagi menjadi 'komoditi politik' untuk mencapai kekuasaan.

BAB IV

KESIMPULAN